

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN POTENSI
PARIWISATA DI KOTA SIBOLGA**

SKRIPSI

OLEH:

RISKA THERESIA SIHOMBING

208510018



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/2/25

Access From (repository.uma.ac.id)21/2/25

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN POTENSI
PARIWISATA DI KOTA SIBOLGA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh

Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Medan Area

Oleh:

RISKA THERESIA SIHOMBING

208510018

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted  21/2/25

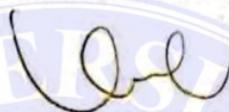
Access From (repository.uma.ac.id)21/2/25

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Riska Theresia Sihombing
Npm : 208510018
Judul : Implementasi Kebijakan Pengembangan Potensi Pariwisata
Di Kota Sibolga
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disetujui Oleh,

Komisi Pembimbing



Evi Yunita Kurniaty, S.Sos, M.I.P

Mengetahui,



Dr. Walid Musthafa Sembiring, S.sos.M.I.P
Dekan Fakultas ISIPOL



Dr. Novita Kusandari S.ST, M.SI
Ka Prodi Ilmu Pemerintahan

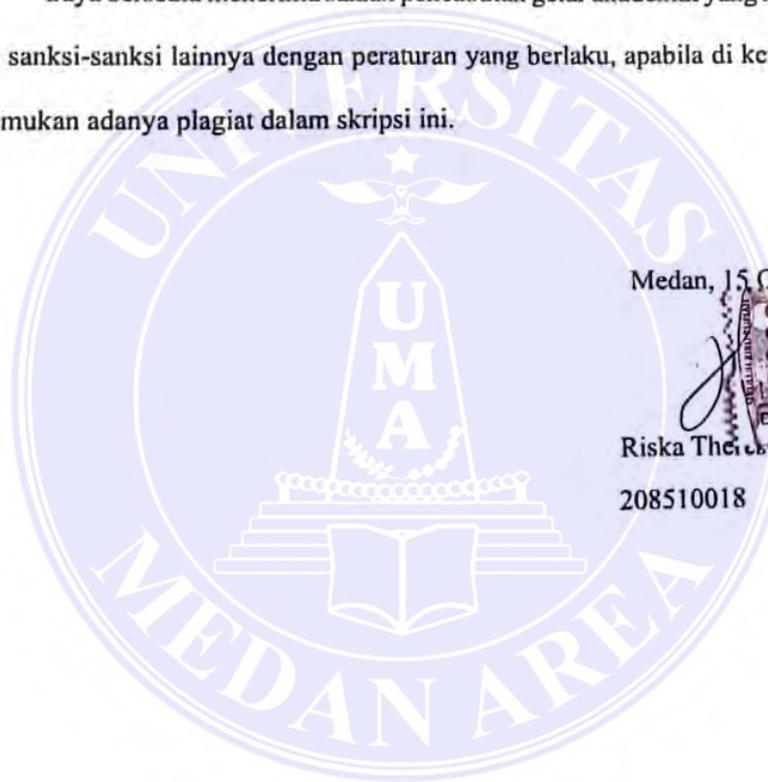
Tanggal Lulus : 01 Oktober 2024

 Dipindai dengan CamScanner

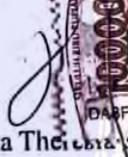
HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 15 Oktober 2024..


METERAI TEMPEL
DAF1ALX391813443

Riska Theresia Sihombing

208510018

CS Dipindai dengan CamScanner

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Riska Theresia Sihombing
Npm : 208510018
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Dari pengemangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Implementasi Kebijakan Pengembangan Potensi Pariwisata Di Kota Sibolga", beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti noneklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan

Pada Tanggal: 15 Oktober 2024

Yang menyatakan,


Riska Theresia Sihombing
208510018

 Dipindai dengan CamScanner

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA KOTA SIBOLGA

Nama : Riska Theresia Sihombing

Npm : 208510018

Penelitian ini dilakukan karena menurunnya kunjungan wisatawan ke Kota Sibolga, yang mendorong pemerintah Kota Sibolga untuk menerapkan pengembangan pariwisata. Meskipun telah dibangun fasilitas pariwisata di kawasan wisata Pelabuhan Lama Sibolga, namun penggunaannya belum optimal sehingga pariwisata bahari di kawasan tersebut belum berkembang. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, termasuk indikator komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Menggunakan teori implementasi Edwardd III, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sasaran kebijakan untuk peningkatan kunjungan wisman dan wisnus telah ditetapkan, namun standar kebijakan belum tercantum. Sarana dan prasarana sudah ada, tetapi SDM, anggaran, dan waktu masih menjadi kendala. Koordinasi dengan stakeholder berjalan lancar, meskipun masih ada konflik internal di dalam Dinas Pariwisata. Dukungan dari anggota DPRD dan masyarakat ada, namun masalah anggaran perlu diatasi untuk mendukung implementasi kebijakan ini. Selanjutnya, perlu upaya lebih lanjut dalam meningkatkan koordinasi antar instansi dan pengelolaan sumber daya agar pengembangan pariwisata di Kota Sibolga dapat berjalan optimal.

Kata kunci : Implementasi, Kebijakan, Pengembangan Pariwisata

ABSTRACT

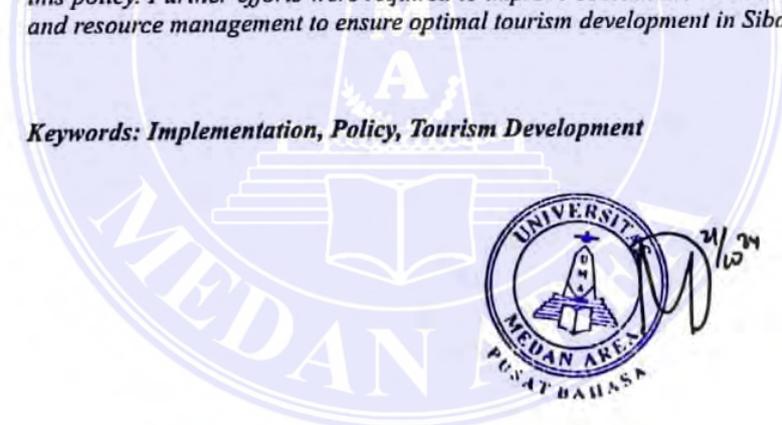
**IMPLEMENTATION OF THE POLICY FOR DEVELOPING TOURISM
POTENTIAL IN SIBOLGA CITY**

Name: Riska Theresia Sihombing

Npm: 208510018

This research was conducted due to a decrease in tourist visits to Sibolga City, prompting the local government to implement tourism development strategies. Despite the construction of tourism facilities in the Pelabuhan Lama Sibolga, their utilization had not been optimal, resulting in the underdevelopment of marine tourism in the area. The research identified factors affecting the implementation of policies, including communication, resources, disposition, and bureaucratic structure indicators. Using Edward III's implementation theory, this research applied a qualitative approach through interviews, observations, and documentation studies. The research findings revealed that policy targets for increasing foreign and domestic tourist visits had been set, but policy standards had not been clearly defined. Infrastructure was available, but human resources, budget, and time remained obstacles. Coordination with stakeholders was smooth, although internal conflicts within the Tourism Office existed. Support from DPRD members and the public was present, but budget issues needed to be addressed to support the implementation of this policy. Further efforts were required to improve coordination between agencies and resource management to ensure optimal tourism development in Sibolga City.

Keywords: Implementation, Policy, Tourism Development



CS Dipindai dengan CamScanner

RIWAYAT HIDUP

Nama : Riska Theresia Sihombing

Tempat dan Tgl lahir : Sibolga, 14 Juni 2001

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Mahasiswa

Pendidikan Formal

2019-Sekarang : Program Studi Ilmu Pemerintahan

2016-2019 : SMA Negeri 1 Sibolga

2013-2016 : SMP Negeri 1 Sibolga

2007-2013 : SD Megeri 084094 Sibolga

Alamat Rumah : Jl. Patuan Anggi No.73 Sibolga

E-mail : riskatheresia28@gmail.com

Nomor Hp : 082249930644

KATA PENGANTAR

Segala Hormat, puji Syukur dan terima kasihku pada Tuhan dalam Yesus Kristus atas cinta, berkat dan anugerah yang tak terbatas dalam hidupku, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Implementasi Kebijakan Pengembangan Potensi Pariwisata di Kota Sibolga”**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Pemerintahan.

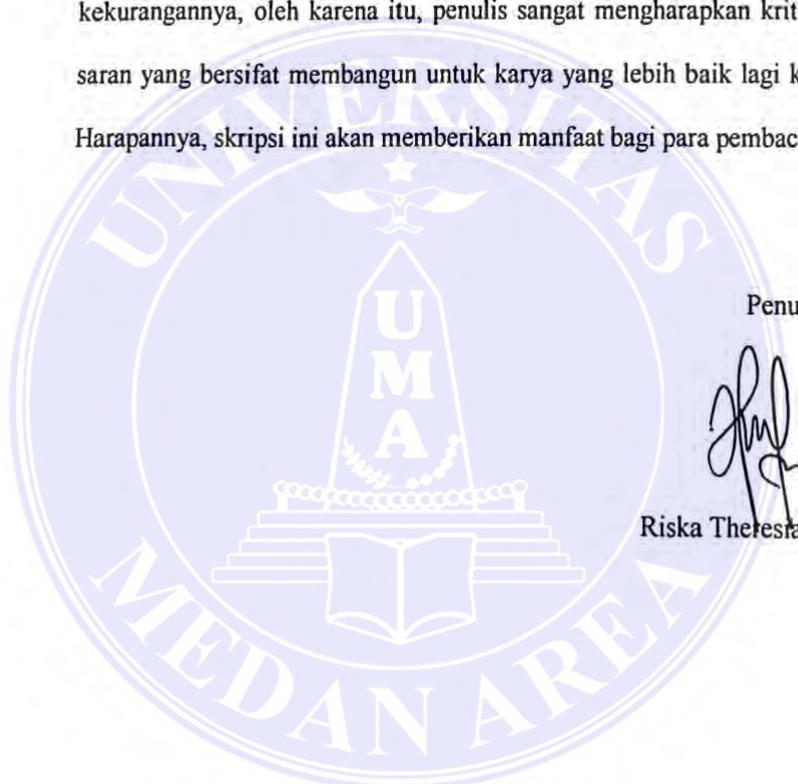
Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Ketua Yayasan Universitas Medan Area Bapak Drs.M.Erwin Siregar, MAB beserta Jajaran
2. Rektor Universitas Medan Area Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Dr.Walid Musthafa Sembiring, S.Sos M.IP
4. Ibu Dr. Novita Wulandari, S.ST, M.Si selaku Ketua Program Studi
5. Ibu Evi Yunita Kurniaty, S.Sos, M.IP Selaku Dosen Pembimbing saya yang telah memberikan banyak pengarahan serta membimbing penulisan skripsi ini.
6. Kedua orangtua saya bapak Rihard Parlindungan Sihombing dan ibu saya Doris Moi Anna yang telah berpulang kepangkuan yang Maha Kuasa dan abang adik saya tercinta dan segenap seluruh keluarga yang senantiasa memberi dukungan dan bantuan baik moril ataupun material serta

serta saudara-saudara kami atas doa bimbingan serta kasih sayang yang tercurah selama ini yang senantiasa mensupport

7. Sahabat saya Nadya Lumbantobing, Yohana wika, Usmi Tanjung, Novariany ka'u, Melyyana Purba, Sartika Ningsih.
8. Kepada yang terkasih, Hardy Girsang yang sudah memberi semangat dalam penyelesaian penulisan ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa di dalam skripsi ini masih ada banyak kekurangannya, oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan juga saran yang bersifat membangun untuk karya yang lebih baik lagi kedepannya. Harapannya, skripsi ini akan memberikan manfaat bagi para pembaca.



Penulis

Riska Theresia Sihombing

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. RUMUSAN MASALAH	10
1.3. TUJUAN PENELITIAN	10
1.4. MANFAAT PENELITIAN.....	10
1.4.1. Manfaat teoritis	10
1.4.2. Manfaat Praktis	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1. Implementasi Kebijakan.....	11
2.2 Pariwisata dan Kepariwisata.....	17
2.3 Perkembangan Potensi Pariwisata.....	21
2.4. Kerangka Berfikir.....	23
2.5 Penelitian Terdahulu	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	29
3.1. Jenis Penelitian	29
3.2. Informan Penelitian	30
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.4 Teknik Analisis Data.....	32
3.5 Jenis dan Sumber Data	33
3.6 Lokasi dan Jadwal Penelitian	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	35
4.1 Hasil.....	35
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	35
4.1.2 Letak Geografis dan luas wilayah.....	36
4.1.3 Penduduk sebagai potensi SDM Pariwisata	36

4.1.4 Tujuan Pembangunan Kepariwisata Kota Sibolga.....	38
4.1.5 Visi-Misi Pembangunan Pariwisata Kota Sibolga.....	40
4.1.6 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kota Sibolga.....	41
4.2 Pembahasan.....	48
4.2.1 Implementasi Kebijakan Pengembangan Potensi Pariwisata Di Kota Sibolga.....	48
4.3 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan pengembangan pariwisata di Kota Sibolga.....	61
4.3.1 Faktor pendukung implementasi kebijakan pengembangan pariwisata Kota Sibolga.....	61
4.3.2 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Kota Sibolga.....	62
BAB IV KESIMPULAN DAN SARANAN.....	63
5.1 Kesimpulan.....	63
5.2 Saranan.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN 1 PEDOMAN OBSERVASI.....	67
LAMPIRAN 2 PEDOMAN WAWANCARA.....	68
LAMPIRAN 3 HASIL OBSERVASI.....	70
LAMPIRAN 4 HASIL WAWANCARA.....	71
LAMPIRAN 5. SURAT PENGANTAR RISET DARI KAMPUS.....	77
LAMPIRAN 6 SURAT SELESAI RISET DARI KANTOR DINAS.....	78
LAMPIRAN 7. DOKUMENTASI PENELITIAN.....	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu.....	26
Tabel 2 Informan Penelitian	31
Tabel 3 Jadwal rincian penyelesaian skripsi.	34
Tabel 4 Jumlah penduduk berdasarkan kecamatan.....	37
Tabel 5 Jumlah Hotel Kota Siboga.....	63
Tabel 6. Jumlah restoran menurut kecamatan.....	63



DAFTAR GAMBAR

1.Kerangka Berfikir.....	25
2.Struktur Organisasi Dinas pariwisata pemuda dan olahraga kota sibolga.....	42



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, bahwa tujuan Kepariwisataan adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam dan lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan. Perkembangan dunia pariwisata telah mengalami berbagai perubahan baik perubahan pola, bentuk dan sifat kegiatan, serta dorongan orang untuk melakukan perjalanan (Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol 3 Nomor 2, Juli 2010). Pariwisata merupakan industri gaya baru yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cukup dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup dan dalam mengaktifkan sektor lain didalam Negara penerima wisatawan.

Menurut definisi yang lebih luas pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, bersifat sementara dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi social, budaya, alam dan imu (Spillane, dalam Pitana, 2001).

Kementerian Pariwisata mengeluarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Hasil Destinasi Pariwisata Berkelanjutan bertujuan memberikan acuan komprehensif mengenai pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan, sehingga pengelolaan perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan kawasan sebagai destinasi pariwisata yang berkelanjutan.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan disusun mulai dari skala nasional (Ripparnas) sampai skala provinsi/kabupaten/kota (Ripparprov/kab/kota). Ringkasnya, Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (Ripparda) dalam skala provinsi/kabupaten/kota merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah/Panjang Nasional yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi daerah masing-masing.

Ripparda Kota Sibolga telah di susun tahun 2019 dalam waktu 5 tahun ini telah terjadi perubahan yang relatif cepat, baik dalam regulasi maupun pemekaran wilayah kecamatan dan kelurahan/desa. Salah satu yang strategis adalah Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 tahun 2016 tentang Hasil Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (Rippar) provinsi, kab/kota yang wajib di hasili dan Undang-Undang No.10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang mengharuskan setiap provinsi/kabupaten/kota memiliki Ripparda.

Implementasi dari kebijakan pengembangan pariwisata melibatkan berbagai pihak sebab pariwisata merupakan industri multisektoral. Maksudnya disini agar terwujudnya pengembangan pariwisata yang terarah dan maju di butuhkan koordinasi antar berbagai pihak. Dari segi implementasi kebijakan pengembangan standar dan kebijakan yang mempengaruhi pengembangan pariwisata yang dikembangkan harus mengacu sesuai acuan terencana apakah implementasi sudah berjalan sesuai mestinya. Dalam melakukan pengembangan dengan itu perlu adanya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota.

Sebagai dasar pengembangan pariwisata di Kota Sibolga, pemerintah Menyusun standar dan sasaran yang hendak dicapai berikut strategi yang akan dilakukan yang dituangkan dalam bentuk Peraturan daerah (Perda) No.3 tahun 2020

tentang Rencana induk Pembangunan Kepariwisata Kota Sibolga Tahun 2020-2025.

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (DISPARPORA) Kota Sibolga tentu harus sudah siap menyiapkan strategi-strategi agar menjadi pariwisata yang baik. Hal ini dilakukan untuk segera mengembangkan objek wisata yang ada di Kota Sibolga, terkhusus pantai anggar di Kota Sibolga. Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia, dikatakan bahwa tujuan pengembangan pariwisata di Indonesia adalah untuk meningkatkan pendapatan devisa pada khususnya dan pendapatan negara dan masyarakat pada umumnya, perluasan kesempatan serta lapangan kerja, dan mendorong kegiatan-kegiatan industri penunjang dan industri industri sampingan lainnya.

Dengan melakukan pengembangan suatu daerah dengan potensi yang ada di wilayahnya akan memberikan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah dalam membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Maka dari itu perlu adanya Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) guna meningkatkan terealisasinya suatu pembangunan pariwisata daerah.

Salah satu kabupaten yang terdapat di Sumatera Utara memiliki potensi untuk dijadikan sebagai salah satu daerah tujuan wisata yaitu kabupaten Tapanuli Tengah khususnya kota Sibolga. Kebudayaan, Sejarah serta pesona alam yang dimiliki kota Sibolga sudah sepantasnya dipromosikan baik di dalam maupun ke luar negeri dan peningkatan pengembangan pariwisata secara terencana, terarah, terpadu dan efektif.

Secara keseluruhan, luas wilayah administrasi Kota Sibolga adalah sebesar 10,77 km² atau 1077.00 hektar layak huni, yang terdiri dari wilayah daratan seluas

8,89 km² atau 88.900 Ha daratan di Pulau Sumatera dan 1,88 km² atau 18.800 Ha luas daratan berupa kepulauan. Wilayah darat Kota Sibolga relatif kecil dari wilayah keseluruhan kota yaitu seluas 1.072 hektar atau 30,45%, baik daratan Pulau Sumatera seluas maupun pulau-pulau kecil lainnya. Sedangkan, wilayah laut hampir dua kali lipat dari luas wilayah darat, yaitu seluas 1.706 hektar atau 61,4% dari keseluruhan wilayah. Dengan demikian, Sibolga termasuk kota terkecil di Indonesia menurut luas lahan.

Pulau-pulau yang termasuk dalam Kawasan otoritas Pemerintah Kota Sibolga adalah Poncan Gadang, Poncan Ketek, Pulau Sarudik, dan Pulau Panjang. Umumnya pulau-pulau ini bukan menjadi Kawasan hunian penduduk. Sedangkan wilayah administrasi pemerintahan kota Sibolga terdiri dari 4 (empat) wilayah kecamatan yaitu kecamatan Sibolga Utara, kecamatan Sibolga Kota, kecamatan Sibolga Selatan dan kecamatan Sibolga Sambas.

Dilihat dari sisi kepariwisataan, kota Sibolga sangat potensial untuk dijadikan sebagai daerah tujuan wisata karena di samping keindahan alam pegunungan, pantai, taman laut, pulau-pulau dan makanan khas yang menjadi daya tarik andalan bagi wisatawan, Sibolga juga kaya akan peninggalan bersejarah, adat dan budaya. Letak sibolga juga sangat strategis untuk perjalanan wisata bagi wisatawan hal ini dikarenakan kota Sibolga merupakan titik sentral bagi wisatawan yang akan melanjutkan perjalanan ke daerah-daerah disekitarnya seperti Pulau Nias, Provinsi Sumatera Barat dan Nanggroe Aceh.

Posisi Kota Sibolga dalam Perwilayahan Pariwisata Sumatera Utara termasuk dalam Destinasi Pariwisata Provinsi Tapanuli Tengah dan sekitarnya dengan Kawasan Strategi Pariwisata Provinsi Kota Sibolga dan sekitarnya. Dengan demikian, Kota Sibolga menjadi andalan dalam pengembangan pariwisata dan

mendorong pertumbuhan wilayah di Provinsi Sumatera Utara. Konsekuensi dari penetapan ini akan adanya dukungan perencanaan dan pengembangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Karena ditetapkan sebagai salah satu kawasan strategi pariwisata provinsi di Sumatera Utara.

Segala potensi wisata yang ada serta didukung dengan letak yang strategis untuk perjalanan wisata membuat Sibolga sangat cocok untuk dijadikan sebagai daerah tujuan wisata (DTW). Namun, keberadaan objek-objek wisata yang ada belum sepenuhnya mendapat perhatian dari pemerintah serta masyarakat setempat hal ini dapat dilihat dari kondisi objek-objek wisata yang ada di Sibolga serta kurangnya informasi mengenai objek-objek wisata yang ada. Oleh karena itu, untuk menjadikan Sibolga sebagai daerah tujuan wisata perlu adanya pembenahan dari lembaga kepariwisataan itu sendiri dan juga masyarakat sebagai insan pariwisata.

Pengelolaan pariwisata memiliki kekuatan penggerak perekonomian yang sangat luas, tidak semata-mata terkait dengan peningkatan kunjungan wisatawan, namun yang lebih penting lagi adalah pengembangan pariwisata yang mampu membangun semangat kebangsaan dan apresiasi terhadap kekayaan seni budaya bangsa.

Mengembangkan objek wisata alam memang dinilai masih tidak tertata, karena dalam pelaksanaan dapat dilihat infrastruktur dan sarana-prasarana yang belum sepenuhnya mendukung, dan ada beberapa hal yang menurun dalam pengembangan daya tarik wisata yaitu kurangnya perawatan fasilitas di daya tarik wisata, kawasan/daya tarik wisata menjadi kumuh, tidak terawat, termasuk perilaku pengunjung yang suka mencoret-coret fasilitas wisata. Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah kemampuan dalam melaksanakan kegiatan pengembangan objek wisata secara efektif dan efisien. Dalam rangka

proses pengembangan di atas maka salah satu tugas penting Pemerintah Kota Sibolga adalah berperan membangun serta mempromosikan sumber daya pariwisata yang ada di Kota Sibolga. Oleh karena itu sangat perlu adanya pengembangan lingkungan yang terencana dari pemerintah untuk keberlanjutan pariwisata kedepannya.

Tujuan Pembangunan Kepariwisata Kota meliputi mengembangkan destinasi bahari sebagai destinasi unggulan, didukung wisata sejarah dan budaya Negeri Berbilang Kaum berbasis masyarakat dan mendorong berkembangnya daya tarik wisata lain, meningkatkan keterpaduan pembangunan lintas sektor mulai dari akses, moda transportasi, prasarana, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata untuk meningkatkan konektivitas dan kualitas pelayanan berdaya saing dalam mendorong investasi wisata Bahari, mengembangkan industri wisata bahari berdaya saing yang bertanggung jawab terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya Negeri Berbilang Kaum, membangun struktur industri pariwisata yang kuat dan beridentitas lokal Sibolga Negeri Berbilang Kaum, melalui pembangunan kemitraan di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional, terpadu menghargai dan melestarikan nilai-nilai kearifan lokal, meningkatkan keterpaduan pemasaran berbasis digital *tourism* bersama-sama dengan pemerintah, provinsi maupun lintas pelaku dengan target membangun citra sebagai destinasi wisata bahari dan budaya Negeri Berbilang Kaum, berdaya saing, mewujudkan sistem pemasaran yang efektif dan bertanggung jawab untuk mendorong kunjungan wisatawan yang berkualitas.

Kota Sibolga memiliki potensi objek wisata alam, budaya, dan kuliner khas yang tidak kalah dengan daerah lain, sehingga pemerintah Kota Sibolga menjadikan sektor ini sebagai primadona meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli daerah (PAD). Sibolga masuk dalam kawasan pengembangan

pariwisata. Daerah yang masuk dalam kawasan wisata ini memiliki kesamaan budaya dan seni.

Dari RIPDA Kota Sibolga, salah satu potensi pariwisata Kota Sibolga yang akan dikembangkan yaitu wisata laut ataupun pantai. Disamping dapat menikmati wisata laut, kita juga dapat menikmati keindahan alam Sibolga, air terjun dengan air yang jernih dan sejuk. Pemerintah Kota Sibolga mempunyai hambatan terbesar terutama letaknya belum mampu mendesain atau merencanakan secara terpadu program-program pengembangan pariwisata. Bahkan keindahan potensi yang terkandung, pengelolaan nyaris terabaikan karena alasan dana dan kurangnya investor melirik.

Pariwisata menjadi salah satu primadona bagi negara-negara dalam meningkatkan sumber pendapatannya diluar dari migas dan pajak. Saat ini Indonesia sebagai salah satu negara berkembang mulai mempromosikan negaranya guna menarik pandangan mata dunia lain, hal ini dimaksudkan agar Indonesia semakin terkenal bagi warga/penduduk negara lain untuk berkunjung ke Indonesia. Promosi-promosi yang dilakukan adalah menjual keragaman wisata dan budaya Indonesia, hal inilah ditanggapi positif dengan banyaknya wisatawan dari mancanegara yang berkunjung ke Indonesia.

Strategi peningkatan citra pariwisata Kota Sibolga sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing dilaksanakan melalui promosi, diplomasi, dan komunikasi. Strategi pengembangan kemitraan pemasaran terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan dilaksanakan melalui keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata baik Tingkat nasional, provinsi, regional. Strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya

lingkungan, dan wisatawan. Strategi penguatan dan perluasan promosi pariwisata di dalam negeri dilaksanakan dengan cara membentuk, mendukung, dan memperkuat Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kota Sibolga. Strategi promosi pariwisata Kota Sibolga di luar negeri dilakukan melalui kantor Kedutaan Kedutaan Indonesia, khususnya negara-negara tetangga ASEAN.

RIPPAR-KOTA ini dapat sekaligus menjadi sarana untuk melindungi dan memajukan potensi lokal, sehingga dapat pula menjadi ciri khas tersendiri bagi Kota Sibolga. Dengan adanya semangat tersebut, diharapkan masyarakat lokal juga dapat dilibatkan secara aktif dalam pembangunan kepariwisataan di Kota Sibolga. Dengan demikian, perkembangan kepariwisataan di daerah tentu juga akan mendorong adanya kemandirian bagi daerah serta pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata. Pada akhirnya, perencanaan yang matang dan sistematis melalui RIPPAR-KOTA ini diharapkan dapat mendorong adanya iklim yang kondusif bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan kepariwisataan di Kota sibolga.

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik meneliti dengan judul implementasi kebijakan pengembangan potensi pariwisata di Kota Sibolga Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengembangan Kota Sibolga sebagai destinasi pariwisata , keadaan alam, faktor-faktor pendorong Kota Sibolga berkembang sebagai destinasi pariwisata, dan kebijakan pemerintahan daerah dalam mengembangkan Kota Sibolga sebagai pariwisata. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif sebagai salah satu cara untuk mendeskripsikan masalah yang akan diteliti. Data penelitian ini dikumpulkan dan diperoleh dengan menggunakan Teknik wawancara dengan para informan dan observasi langsung ke

lokasi penelitian. Kota sibolga mempunyai potensi besar dan dapat memberikan harapan bagi perkembangan pariwisata di Kota Sibolga. Dan tentu saja dengan melibatkan semua lapisan masyarakat dalam membantu mengembangkan kota Sibolga sebagai destinasi pariwisata. Dengan adanya RIPPDA diharapkan mampu meningkatkan wisatawan yang berkunjung di Kota Sibolga. Adapun tujuan disusunnya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan adalah untuk memberikan acuan bagi pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan untuk menentukan langkah-langkah pembangunan strategis bagi sektor kepariwisataan di daerah. RIPPDA menjadi pintu gerbang untuk lahirnya regulasi kepariwisataan di daerah, baik dari sisi pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat. Dengan tersusunnya RIPPDA, diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata nasional secara umum dan kemajuan pariwisata daerah secara khusus. Maka penulis tertarik untuk membahas tentang Implementasi Kebijakan Pengembangan Potensi Pariwisata di Kota Sibolga.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan pada penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana implementasi kebijakan pengembangan potensi pariwisata di Kota Sibolga?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pengembangan potensi pariwisata di Kota Sibolga?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pengembangan potensi pariwisata di Kota Sibolga
2. Untuk mengetahui factor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pengembangan potensi pariwisata di Kota Sibolga

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat seperti berikut :

1.4.1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Ilmu Pemerintahan terkait implementasi kebijakan pengembangan potensi pariwisata di Kota Sibolga.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah berkaitan dengan pengembangan potensi pariwisata di Kota Sibolga.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Udoji (1981,32) dengan tegas mengatakan bahwa *the execution of policies is as important if not more important than policy-making. Policies will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented* (Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. Dengan kata lain pembuatan kebijakan tidak berakhir setelah kebijakan ditentukan atau disetujui.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip Solihin Abdul Wahab (2008: 65), mengatakan bahwa Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya Hasil -Hasil kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Sehubungan dengan sifat praktis yang ada dalam proses implementasi kebijakan, maka hal yang wajar bahwa implementasi ini berkaitan dengan proses politik dan administrasi. Hal tersebut disebabkan karena ia menyangkut tujuan dari diadakannya kebijakan tersebut (*policy goals*). Dan jika dilihat dari konteks

implementasi kebijakan, maka hal tersebut berkaitan dengan kekuasaan (*power*), kepentingan dan strategi para pelaku kebijakan, disamping karakteristik lembaga dan rezim serta ijin pelaksanaan dan respon terhadap kebijakan.

Konteks implementasi demikian baru akan terlihat pengaruhnya setelah kebijakan tersebut dilaksanakan. Hal itulah yang menunjukkan bahwa proses pelaksanaan kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dan momentum dalam proses perumusan/pembuatan kebijakan selanjutnya, sebab berhasil atau tidaknya suatu kebijakan dalam mencapai tujuannya ditentukan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, rumusan kebijakan yang telah dibuat tidak akan mempunyai arti apa-apa atau hanya akan merupakan rangkaian kata-kata indah dan baku yang tersimpan rapi dalam sebuah dokumen kalau tidak diimplementasikan. Berkaitan dengan hal itu, dapat dikatakan bahwa salah satu tolok ukur keberhasilan suatu strategi atau kebijakan terletak pada proses implementasinya.

Oleh karena itu menurut Jones (1996) tidak berlebihan jika dikatakan implementasi adalah merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses lahirnya kebijakan. Namun kebanyakan dari kita seringkali beranggapan bahwa setelah kebijakan disahkan oleh pihak yang berwenang dengan sendirinya kebijakan itu akan dapat dilaksanakan, dan hasil-hasilnya pun akan mendekati seperti yang diharapkan oleh pihak pembuat kebijakan tersebut.

Menurut Salusu (2002), implementasi adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan menyusul satu keputusan. Suatu keputusan selalu dimaksudkan untuk mencapai sasaran. Guna merealisasikan pencapaian sasaran tersebut, diperlukan serangkaian aktivitas. Jadi dapat dikatakan bahwa implementasi adalah operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai sasaran tertentu. Masih dalam Salusu (2002), Higgins merumuskan implementasi sebagai rangkuman dari

berbagai kegiatan yang didalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran dan strategi. Sehingga kegiatan implementasi ini, menyentuh semua jajaran manajemen mulai dari manajemen puncak sampai pada karyawan lini paling bawah.

Implementasi adalah berkenan dengan berbagai kegiatan yang di arahkan pada realisasi program. Menurut Mazmania dan Sabatier (dalam subarsono,2011:94) mendefenisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Model implementasi kebijakan ini membahas faktor yang menghambat dan membantu jalannya suatu kebijakan. Implementasi dari kebijakan melewati proses yang dinamis yang mencakup banyak interaksi yang akan mempengaruhi jalannya proses implementasi kebijakan.

Menurut Edward III (1980) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

1. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada kepada komunikan. Sementara komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Informasi kebijakan perlu disampaikan pada pelaku kebijakan agar pelaku dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan

dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri. Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi, kejelasan informasi, dan konsistensi informasi. Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang disampaikan jelas dan mudah dipahami, untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksanaan kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

2. Sumber Daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Menurut pandangan Edwards (dalam Budi Winarno, 2008) sumber-sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

Struktur Birokrasi menurut Edwards (dalam Budi Winarno, 2008) terdapat dua karakteristik utama, yakni Standard Operating Procedures (SOP) dan Fragmentasi SOP atau prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Sedangkan fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah.

Kesemua variabel tersebut di atas membentuk sikap pelaksana terhadap kebijakan yang mereka implementasikan dan menentukan seberapa tinggi kinerja kebijakannya. Kognisi, netralitas, dan obyektifitas para individu pelaksana sangat

mempengaruhi bentuk respons mereka terhadap semua variabel tersebut. Wujud respons individu pelaksana menjadi penyebab dari berhasil dan gagalnya implementasi kebijakan, lebih-lebih apabila sistem nilai yang mempengaruhi sikapnya berbeda dengan sistem nilai pembuat kebijakan, maka implementasi tidak akan efektif.

Pada bagian lain, mengenai pelaksanaan kebijakan, Hoogerwerf (1983:17) mengemukakan sebagai berikut Bahwa pelaksanaan kebijakan itu hampir selalu harus disesuaikan lagi. Hal itu disebabkan karena tujuan dirumuskan terlalu umum, sarana tidak dapat diperoleh pada waktunya dan faktor waktu dipilih terlalu optimis, semua ini berdasarkan gambaran situasi yang kurang tepat. Dengan perkataan lain pelaksanaan kebijakan didalam praktek sering menjadi suatu proses yang berbelit-belit, yang menjurus kepada permulaan baru dari pada seluruh proses kebijakan atau menjadi buyar sama sekali.

Keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan dapat di evaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan dan mengoperasionalkan program-program pemerintah yang telah di rancang sebelumnya dengan adanya kebijakan implementasi, yang merupakan bentuk konkret dari konseptualisasi dalam kebijakan formulasi, tidak secara otomatis merupakan garansi berjalannya suatu program dengan baik. Oleh karena itu suatu kebijakan implementasi pada umumnya satu paket dengan kebijakan pemantauan atau monitoring. Mengingat kebijakan implementasi adalah sama peliknya dengan kebijakan formulasi, maka perlu diperhatikan berbagai faktor yang akan mempengaruhinya.

2.2 Pariwisata dan Kepariwisataan

Menurut arti katanya, pariwisata berasal dari bahasa sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu kata “pari” berarti penuh, seluruh, atau semua dan kata “wisata” yang bermakna perjalanan. Menurut yoeti (2003), syarat suatu perjalanan disebut sebagai perjalanan pariwisata apabila perjalanan dilakukan dari suatu tempat ke tempat yang lain, di luar tempat kediaman orang tersebut biasa tinggal. Tujuan perjalanan semata-mata untuk bersenang-senang dan tidak mencari nafkah di tempat atau negara yang dikunjunginya, semata-mata sebagai konsumen di tempat yang dikunjungi.

Menurut Wahab (1992) pariwisata mengandung unsur antara lain manusia, yakni unsur insani sebagai pelaku kegiatan pariwisata, tempat yakni unsur fisik yang sebenarnya tercakup oleh kegiatan itu sendiri, dan waktu yakni unsur tempo yang dihabiskan dalam perjalanan tersebut dan selama berdiam di tempat tujuan. Jadi definisi pariwisata adalah salah satu dari industri baru yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup dan dalam hal mengaktifkan sektor produksi lain di dalam negara penerima wisatawan.

Sementara menurut Spillane (1993) pariwisata adalah suatu jasa dan pelayanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990, usaha pariwisata dibagi menjadi tiga kelompok utama, yaitu usaha jasa pariwisata, perusahaan objek dan daya tarik wisata dan usaha sarana pariwisata. Sedangkan yang dimaksud dengan usaha adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk dijual dalam suatu lokasi tertentu serta mempunyai catatan administrasi tersendiri dan ada salah satu orang yang bertanggung jawab.

Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata, menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut. Sesuai dengan Undang-Undang RI No. 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan, usaha pariwisata digolongkan ke dalam:

1. Usaha jasa pariwisata, timbul karena adanya berbagai macam keperluan dan kebutuhan bagi wisatawan akan mendorong tumbuhnya berbagai jenis usaha jasa pariwisata yang menyediakan keperluan bagi wisatawan serta bertujuan untuk membantu kelancaran perjalanan calon wisatawan. Usaha jasa terdiri dari Jasa biro perjalanan wisata adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata. Jasa agen perjalanan wisata adalah badan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan. Jasa Informasi pariwisata adalah usaha penyediaan informasi, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan.
2. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam, merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya yang telah ditetapkan sebagai objek dan daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata.
3. Usaha sarana pariwisata dikelompokkan dalam, penyediaan akomodasi adalah usaha penyediaan kamar dan fasilitas lain serta pelayanan yang diperlukan. Dan penyediaan makanan dan minuman yang dapat

dilakukan sebagai bagian dari penyediaan akomodasi. Penyediaan angkutan wisata yaitu angkutan khusus wisata atau angkutan umum yang menyediakan angkutan wisata.

Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Upaya pembangunan sektor pariwisata melibatkan seluruh masyarakat, disamping penyelenggara Negara dan swasta. Meskipun sudah banyak pelaksanaan dan upaya pemerintah dalam mengembangkan pariwisata tersebut. Pemerintah dalam hal ini sangat tergantung dari dukungan masyarakat dan swasta. Ini berarti untuk tercapainya keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, perlu adanya dukungan kesadaran dedikasi serta loyalitas dari segenap masyarakat.

Kepariwisataan adalah fenomena politik-sosial-ekonomi-budaya fisik yang muncul sebagai wujud kebutuhan manusia dan negara serta interaksi antara wisatawan dengan masyarakat tuan rumah, sesama wisatawan, pemerintah dan pengusaha berbagai jenis barang dan jasa yang diperlukan oleh wisatawan (Warpani P, 2007).

Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapuskan kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa,

memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa dan mempererat persahabatan antarbangsa.

Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan local, memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas, memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup, memberdayakan masyarakat setempat, menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan, mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata, memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepariwisataan merupakan keseluruhan upaya yang dilakukan pemerintah, pengusaha dan masyarakat dalam membangun pariwisata dengan didasarkan pada nilai-nilai agama, pelestarian sumber daya alam, budaya, serta memperhatikan kepentingan politik, ekonomi, sosial dan budaya dan pertahanan keamanan. Menurut Kurt Morgenroth dalam Yoeti (1983) menyatakan kepariwisataan dalam arti sempit, adalah lalu lintas orang-orang yang meninggalkan tempat kediamannya untuk sementara waktu, untuk berpesiar di tempat lain, semata-mata sebagai konsumen dari buah hasil perekonomian dan kebudayaan guna memenuhi kebutuhan hidup dan budayanya atau keinginan yang beraneka ragam dari pribadinya.

2.3 Perkembangan Potensi Pariwisata

Dalam Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia (2003) pengertian potensi adalah kesanggupan, kekuatan dan kemampuan. Menurut R G Soekadijo (1997) menjelaskan potensi pariwisata dengan menggunakan istilah modal kepariwisataan (*tourism assets*) atau sering juga disebut sumber kepariwisataan (*tourism resources*). Lebih lanjutnya R G Soekadijo mengemukakan bahwa suatu daerah atau tempat hanya dapat menjadi tujuan wisata kalau kondisinya sedemikian rupa sehingga ada yang dapat dikembangkan menjadi atraksi wisata. Apa yang dapat dikembangkan menjadi atraksi wisata itulah yang disebut modal atau sumber kepariwisataan (*tourism resources*). Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa potensi adalah daya, kekuatan, kemampuan dan kesanggupan baik yang berasal dari lingkungan alam yang dapat mendukung kehidupan manusia maupun suatu proses yang disebabkan oleh budi daya manusia yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan.

Pengembangan pariwisata merupakan suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan menuju ketataran nilai yang lebih tinggi dengan cara melakukan penyesuaian dan koreksi berdasar pada hasil monitoring dan evaluasi serta umpan balik implementasi rencana sebelumnya yang merupakan dasar kebijaksanaan dan merupakan misi yang harus dikembangkan. Pengembangan pariwisata dilakukan bertujuan untuk menjadikan pariwisata maju dan berkembang kearah yang lebih baik dari segi kualitas sarana-prasarana, memudahkan akses kemana saja, menjadi destinasi yang diinginkan, dan menjadikan manfaat yang baik secara ekonomi bagi masyarakat sekitar (Santosa, 2014). Pengembangan pariwisata bukanlah sistem yang berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan

sistem perencanaan pembangunan yang lain secara intern sektoral dan intern regional (Wahyudi, 2020).

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (2003) pengembangan merupakan perbuatan (hal, cara, usaha) mengembangkan. Menurut Mill (Wahyundari 2011) tujuan pengembangan pariwisata adalah dikembangkan secara cepat, tepat, pariwisata dapat memberikan keuntungan bagi wisatawan maupun komunitas tuan rumah. Pariwisata dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui keuntungan secara ekonomi yang dibawa ke kawasan tersebut.

Menurut Nandi (2008) dalam pengembangan pariwisata, objek wisata dan daya tarik wisata merupakan fokus utama dalam arti penggerak utama motivasi wisatawan mengunjungi suatu tempat dan focus orientasi bagi pembangunan pariwisata terpadu. Disamping itu, Rani (2014) mengatakan bahwa dalam pelaksanaan pengembangan objek wisata dan daya tarik wisata kiranya perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kemampuan mendorong peningkatan dan perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya;
2. Nilai-nilai agama, adat istiadat serta pandangan dan nilai-nilai hidup di masyarakat;
3. Kelestarian budaya dan mutu lingkungan;
4. Kelangsungan usaha sendiri. Guna memberikan pelayanan yang optimal bagi wisatawan.

Rajak (2013) mengemukakan bahwa diperlukan beberapa fasilitas-fasilitas yang di butuhkan wisatawan seperti hotel, transportasi, objek yang menarik (atraksi wisata) dan sarana-sarana yang dapat memberikan kenyamanan pada wisatawan dalam melakukan wisata di suatu daerah tujuan wisata. Penyediaan fasilitas-

fasilitas diatas guna meningkatkan lama tinggal wisatawan di daerah wisata yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan daerah dari belanja wisatawan.

2.4. Kerangka Berfikir

Pengembangan kegiatan pariwisata diperlukan pengaturan-pengaturan alokasi ruang yang dapat menjamin *sustainable development* guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dalam pengembangan kepariwisataan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya alam buatan secara berdaya guna, berhasil guna dan tepat guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan dan keamanan, oleh karena itu dibutuhkan strategi-strategi khusus dari pemerintah kita untuk mengelola kepariwisataan nasional. Karena dengan itu cara pengelola dapat lebih mudah dilaksanakan oleh pemerintah atau masyarakat luas.

Penataan ruang pada dasarnya merupakan sebuah pendekatan dalam mengembangkan wilayah yang bertujuan untuk mendukung komisi, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan serta ditunjang dengan beberapa sarana prasarana demi mendapatkan tujuan yang diinginkan oleh masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan daerah-daerah pariwisata yang berada di daerah Kota Sibolga. Penataan ruang untuk menunjang kepariwisataan tidak hanya memberikan arahan lokasi investasi, tetapi juga haru memberikan arahan jaminan terpeliharanya ruang/daerah pengembangan pariwisata yang berkualitas dan mempertahankan keberadaan objek-objek pariwisata. Keterbatasan dukungan sarana dan prasarana penunjang merupaka juga salah satu yang perlu diperhatikan. Dimana dukungan sarana dan prasarana merupakan faktor penting untuk keberlanjutan penyelenggaraan kegiatan pariwisata, seperti penyediaan akses, akomodasi, sarana

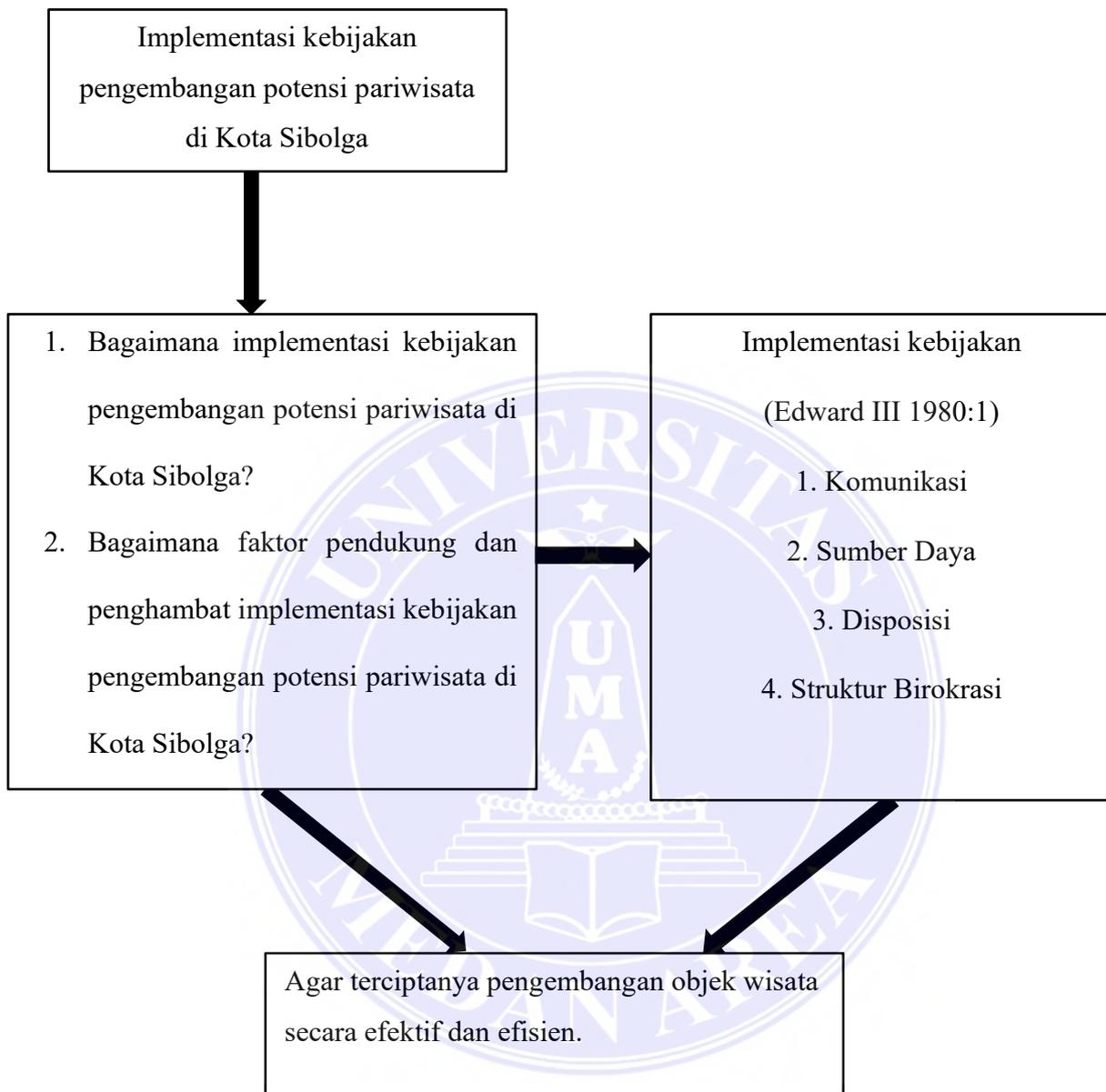
prasarana pendukung lainnya. Masih banyak kawasan wisata yang sangat berpotensi, tetapi masih belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

Selain didukung oleh penataan ruang sarana-sarana yang menunjang dalam kegiatan pengelolaan pariwisata juga didukung oleh beberapa sumber-sumber, yakni sumber daya manusia, sumber keuangan dan sumber materi atau fisik. Ketiga sumber itu sangat berkaitan satu sama lainnya. Oleh karena itu ketiganya harus benar-benar bisa terpenuhi, karena pengelolaannya sangat berpengaruh besar bagi kepariwisataan.

Pelaksanaan pengelolaan nasional yang meliputi seluruh aspek kehidupan yang kompleks, tentunya sangat diperlukan adanya organisasi yang mantap dan tangguh, sehingga dengan demikian diharapkan sarana atau tujuan dapat tercapai secara optimal. Pemerintah Kota Sibolga melalui dinas kebudayaan dan pariwisata diharapkan mampu berperan dalam menunjang program pengelolaan pariwisata.

Sesuai dengan fungsinya tersebut, dinas pariwisata pemuda dan olahraga, Kota Sibolga menyusun program kerja yang dirasa relevan dengan keadaan kepariwisataan di Kota Sibolga. Untuk menghindari terjadinya kesalahan teknis dilapangan selama melakukan penelitian, maka penelitian ini harus memiliki arah yang menjadi fokus dari penelitian. Alasan saya memilih teori Edward III adalah karena teori tersebut menjelaskan beberapa variabel yang ada pada penelitian saya. Selain itu pada teori ini juga mewakili fenomena masalah yang ada pada latar belakang saya. Terlebih teori ini sering dijadikan referensi oleh peneliti terdahulu. Sehingga teori Edward III sangat tepat untuk dijadikan grand theory pada penelitian saya.

Gambar 1. Kerangka Berfikir



2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. penelitian terdahulu

NO	Nama	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Pariwisata berkelanjutan di Kota Manado Fahri Juarsa Muhammad, ira Irawati, Mas Halimah (2022)	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan fenomenologi dengan teknik kualitatif observasi, kualitatif interview dan kualitatif dokumen.	Dalam penelitian terdahulu menggunakan objek penelitian di Kota Manado sedangkan penelitian ini menggunakan objek di Kota Sibolga.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pariwisata di Kota Manado terus dikembangkan mulai dari infrastruktur destinasi wisata, lokasi UMKM juga direvitalisasi oleh pihak terkait, pelatihan SDM baik eksternal dan internal, koordinasi terus dibangun bersama stakeholders dalam penyelenggaraan event pariwisata, serta adanya partisipasi dari masyarakat dalam memberikan kritik atau masukan terhadap pengembangan pariwisata Kota Manado yang memang masih berada pada tahapan konsultasi saja bersama Dinas Pariwisata Kota Manado, serta adanya penurunan pada PAD Kota Manado yang didominasi oleh bidang pariwisata dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang melanda saat ini.
2.	Implementasi Kebijakan Pengembangan pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat Kariaman Sinaga, M.amri Nasution, Ayu Trisna Dewi	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif	Dalam penelitian terdahulu menggunakan objek penelitian di Kecamatan Pantai Cermin sedangkan penelitian ini menggunakan objek di Kota Sibolga	Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dengan Pemerintah Kecamatan Pantai Cermin kurang berkoordinasi dan komunikasi dalam proses implementasi dan dapat diduga adanya disposis yang salah sesuai dengan prinsip-prinsip implementasi. penetapan kebijakan yang

	(2021)			dilakukan telah mengalami kesalahan dari awal dengan tidak menyesuaikan dengan kondisi masyarakat dan adanya ego sektoral dalam menjalankan suatu implementasi program dikalangan pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dengan Pemerintah Kecamatan Pantai Cermin.
3	Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata berkelanjutan di karimunjava Sri Nurhayati Qodriyatun (2018)	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif	Dalam penelitian terdahulu menggunakan objek penelitian di Karimunjava sedangkan penelitian ini menggunakan objek di Kota Sibolga	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata di Karimunjava belum berkelanjutan. Karena meskipun secara ekonomi telah membuka lapangan kerja baru dan menambah penghasilan di masyarakat, namun secara sosial telah terjadi perubahan nilai dalam masyarakat dan secara ekologis telah terjadi kerusakan lingkungan. Perlu ada satu perencanaan yang terintegrasi yang melibatkan berbagai sektor dan stakeholders. Selain itu, perlu ada penetapan kuota pengunjung didasarkan perhitungan daya dukung dan menambah atraksi untuk meningkatkan lama kunjungan wisata
4	Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata pesisir barat Yusnili (2016)	Penelitian ini menggunakan Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, tehnik pengumpulan	Dalam penelitian terdahulu menggunakan objek penelitian di Pesisir Barat sedangkan penelitian ini menggunakan	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Pesisir Barat sudah cukup baik hal ini dilihat dari segi komunikasi telah dilakukan koordinasi antar lembaga (Pemerintah, masyarakat,

		data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.	objek di Kota Sibolga	pelaku usaha), pemasaran dilakukan oleh PHRI, ASSITA, HPI, dan promosi telah dilakukan secara bersama, dari segi sumberdaya masih diperlukan penambahan pegawai dan perlu diadakan pelatihan serifikasi profesi pariwisata, sikap pelaksana memiliki sikap dan etos kerja yang mendukung kebijakan pariwisata,serta struktur organisasi sudah cukup baik.
5.	Implementasi Kebijakan Pembangunan pariwisata di kabupaten Banyuwangi Eri Irawan (2015)	Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif	Dalam penelitian terdahulu menggunakan objek penelitian di Kabupaten Banyuwangi sedangkan penelitian ini menggunakan objek di Kota Sibolga	Hasil penelitian ini menunjukkan Kebijakan pengembangan pariwisata di Banyuwangi merupakan kebijakan yang diintegrasikan dengan pembangunan infrastruktur, konsolidasi budaya, peningkatan kelestarian lingkungan, dan penguatan citra daerah (rebranding).Dan terdapat faktor penghambat yaitu Kurangnya sinergi (komunikasi) antarpemangku kepentingan sehingga dalam beberapa konteks, implementasi kebijakan justru menghasilkan perubahan yang negatif. Dan faktor pendukung Komitmen para pemimpin politik di daerah tersebut untuk mengembangkan pariwisata sangat tinggi, sehingga bisa menggerakkan perangkat birokrasi sebagai sumber kekuasaan dan finansial untuk memacu berbagai program pariwisata.

Sumber: data diolah peneliti (2023)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Metode kualitatif dilakukan dengan beberapa pertimbangan, pertama menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hubungan antara peneliti dengan responden; ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa metodologi penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa katakata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2000).

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yakni suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum berbagai macam data yang dikumpulkan dari lapangan secara objektif, sedangkan dasar penelitiannya adalah survey yakni tujuan dari peneliti deskriptif ini adalah menggambarkan mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari program pemerintah

daerah dalam mengelola objek wisata alam di Kota Sibolga. Dasar penelitian ini untuk mendapatkan data atau informasi faktual dan yang mendetail di lapangan terhadap objek penelitian yang ada hubungannya dengan permasalahan.

3.2. Informan Penelitian

Menurut Sugiyono, (2016) Informan atau narasumber dalam penelitian merupakan seseorang yang memiliki informasi maupun data yang banyak terkait masalah dan objek yang sedang diteliti sehingga nantinya akan dimintai informasi mengenai objek penelitian tersebut.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel didasarkan atas tujuan tertentu atau orang yang dianggap paling mengetahui apa yang diharapkan (Sugiyono, 2011). Informan penelitian ini dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

1. Informan kunci Menurut Moleong (2015) “informan kunci atau informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian dan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti
2. Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti (Bagong, 2005).
3. Informan pendukung merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak secara langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti (Bagong, 2005).

Selengkapnya pada tabel berikut:

Tabel 2. Informan Penelitian

NO	URAIAN	JUMLAH (Org)	KETERANGAN
1	Ahmad fajrin Telambanua S.Pi M.M	1	Informan Kunci
2	Hemdra Libestro S.Kom	1	Informan Utama
3	Henry Sinaga	1	Informan Pendukung
4	Dinda Azwar Cindy Kristy	2	Informan Pendukung
TOTAL			5

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan (Nazir, 2005). Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Cara menunjukan pada suatu yang abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi hanya dapat dipertontonkan penggunaannya (Arikunto, 2005). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Observasi Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrument. Format yang di susun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang menggambarkan akan terjadi (Arikunto S. , 2006).
- b. Wawancara (*Interview*) Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan
- c. Dokumentasi metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Dibandingkan dengan

metode lain, maka metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati (Arikunto S. , 2006).

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2000). Dalam penelitian ini analisis data dilakukan secara berkesinambungan dari awal sampai akhir penelitian, baik dilapangan maupun diluar lapangan dengan mempergunakan teknik model interaktif, sebagai berikut (Huberman, 1992):

- a. Reduksi data, Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.
- b. Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dalam pengambilan tindakan. Proses penyajian data ini mengungkapkan secara keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca dan dipahami, yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif (Sugiono, 2008).
- c. Kesimpulan dan verifikasi Menurut Sugiyono (2014:99), kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah

yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

3.5 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Adapun jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kualitatif yaitu data yang berbentuk kata, kalimat, skema, atau gambar data adalah unsur penting dalam penelitian berupa sesuai fakta yang ada untuk memperoleh data-data yang dapat diuji kebenarannya, relevan dan lengkap (Sugiyono, 2011)

Untuk melakukan sebuah penelitian, terdapat 2 sumber data yang saya gunakan, yaitu data primer dan data sekunder.

1. **Data Primer**, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pihak-pihak terkait terhadap permasalahan yang diteliti. Untuk memperoleh gambaran yang jelas, maka diadakan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti melalui informan.
2. **Data Sekunder**, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian berwujud laporan dan sebagainya. Dalam hal ini yang menjadi data sekunder yaitu buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dokumen-dokumen yang berisi informasi penting.

3.6 Lokasi dan Jadwal Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Sibolga di kantor Dinas Pariwisata pemuda dan olahraga dengan alasan untuk mengetahui program pemerintah dalam pengelolaan objek wisata alam di Kota Sibolga. Alasan lain dipilih sebagai tempat penelitian karena kota sibolga sebagai kota tua bersejarah yang memiliki pesona

alam yang bagus dan indah dibandingkan dengan tempat wisata lainnya yang ada di daerah lainnya.

Penelitian ini berlangsung selama satu bulan, proses penelitian dimulai dengan proses pengkajian literatur, penyusunan proposal, penyusunan instrumen hingga penyerahan final skripsi, seperti tabel berikut :

Tabel 3. Jadwal rincian penyelesaian skripsi.

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan						
		Okt 23	Mar 24	Juni 24	Juli 24	Juli 24	agust 24	Sept 24
1.	Pengajuan Judui							
2.	Observasi Awal							
3.	Penyusunan Proposal							
4.	Bimbingan dan Perbaikan Proposal							
5.	Seminar Proposal							
6.	Revisi Proposal							
7.	Observasi Lapangan dan Wawancara							
8.	Penyusunan Bab IV – V							
9.	Seminar Hasil							
10.	Bimbingan Dan Perbaikan							
11.	Sidang Skripsi							

Sumber : Diolah oleh peneliti 2024

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARANAN

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian penulis menemukan bahwa relevansi teoritis implementasi kebijakan menurut George C Edward III terdiri dari indikator komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian yang dilakukan menunjukkan komunikasi yang belum berjalan secara maksimal dikarenakan belum adanya unit pelaksana tugas yang jelas di dalam pemerintah Kota Sibolga dalam menjalankan program pengembangan pariwisata. Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata yang dilakukan di Kota Sibolga belum tekordinasi dengan baik sehingga menghambat upaya pengembangan pariwisata. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti menyimpulkan mengenai disposisi yakni komitmen dan sikap para pelaksana kebijakan belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dilihat dari belum adanya kebijakan dari pemerintah akan pengembangan pariwisata di Kota Sibolga terutama pada Pantai anggar.
2. Faktor pendukung implementasi kebijakan pengembangan pariwisata Kota Sibolga yaitu Komunikasi, Pemerintah kota sibolga mendukung pariwisata dengan diadakanya sosialisasi ke daerah-daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kota Sibolga dapat membantu masyarakat dalam mengetahui informasi. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kota Sibolga yaitu Sumber Daya di Pelabuhan lama/Pantai anggar belum berjalan sebagaimana mestinya, karena masih kurangnya ahli IT dan juga yang memahami bahasa asing, sehingga sulit untuk menjangkau para wisatawan yang berkunjung ke Pantai anggar

5.2 Saranan

1. Berdasarkan Peraturan Kota Sibolga tentang pembangunan pariwisata pemerintah seharusnya menetapkan anggota yang sesuai dengan jabatan dan tugasnya sehingga anggota-anggota tersebut mengerti bagaimana tugas serta peran mereka dalam pelaksanaan kebijakan. Kemudian pemerintah juga harus meningkatkan sumber daya manusia dibidang pariwisata dengan diadakan studi wisata untuk mengatasi keterbatasan pemahaman masyarakat pada sektor pariwisata sehingga dapat menyeimbangkan antara sumber daya manusia dan kekayaan alam yang dimiliki oleh Kota Sibolga.
2. Dengan adanya peraturan daerah Kota Sibolga pemerintah khususnya Dinas Pariwisata harus bekerja sama dengan pihak yang dapat mengelola objek wisata seperti masyarakat setempat dan memperhatikan mitra pariwisata terlebih dari segi modal untuk membantu mengembangkan objek wisata serta meningkatkan kunjungan wisata. Pemerintah juga perlu meningkatkan komitmen dalam memajukan industri pariwisata dengan memperhatikan fasilitas umum dan juga sarana prasarana menuju objek wisata sehingga dapat menarik wisatawan untuk berkunjung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- AG.subarsono (2005). *Analisis kebijakan publik, konsep, teori dan aplikasi*. Yogyakarta:pustaka belajar.
- A.M, Utama Rai Bagus Gusti I (2017) *Pemasaran Pariwisata*. Yogyakarta; CV. Andi Offset.
- Arikunto. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Sagung Seto
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta : Rineka Cipta
- James j spillane (1987). *Pariwisata Indonesia:sejarah dan prospeknya*. Kanisius.
- Moleong, L. J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif; Cetakan ke-18*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Jurnal

- George III Edward :menerapkan kebijakan publik, 1980
- Muhammad Juarsa Fahri; Irawati Ira dan Halimah Mas (2022). Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Kota Manado. *JIIP: Jurnal ilmiah Ilmu Pemerintahan*. 7 (1).
- Qodriyatun,Sri Nurhayati. (2018). Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Di Karimunjawa. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*. 9 (2).
- Riani,Ni Ketut. (2021). Pariwisata Adalah Pisau Bermata . 2 (5).
- Sinaga Kariaman; Nasution amri.M dan dewi trisna ayu (2021). Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal manajemen sumber daya manusia,administrasi dan pelayanan publik*.3 (1)
- Situmeang, hot pierre andreas (2022). Peranan pemerintah daerah kota sibolga dalam Pembangunan pariwisata dengan aspek lingkungan , Nomor 01, Mei. *Nommensen journal of Constitutional and Administrative Law*
- Solichin abdul wahab (2021). *Analisa kebijakan:Dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta:Bumi aksara
- Sugiono. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuanititatif, Kualitatif dan R&D, cetakan ke-6*. Bandung: Alfabeta.

Yoeti,2001. Pengantar Ilmu Pariwisata, Bandung : Angkasa

Link

<https://sibolgakota.bps.go.id> Diakses secara online tanggal 30 Sep. 24

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009



LAMPIRAN 1 PEDOMAN OBSERVASI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA DI KOTA SIBOLGA

Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan adalah mengamati keadaan pariwisata dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kota Sibolga.

A. Tujuan

Untuk memperoleh informasi dan data mengenai kondisi fisik maupun nonfisik pariwisata.

B. Aspek yang diamati :

No	Yang diamati	Ya	Tidak	Bukti / Indikator
1	Brosur / Flyer instansi			
2	Struktur Organisasi			
3	Sikap pegawai			
4	Website instansi			
5	Sosial Media Instansi			
6	Sarana Prasarana			

LAMPIRAN 2 PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN potensi PARIWISATA di Kota Sibolga

INFORMAN KUNCI

Dalam usulan penelitian ini peneliti hanya mengemukakan rencana wawancara secara garis besar yang akan di kembangkan secara lebih mendalam pada saat wawancara dilakukan terhadap informan sehingga diharapkan perolehan informasi yang lengkap, aktual dan akurat.

A. Tujuan :

Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program pariwisata Kota Sibolga

Pertanyaan panduan:

a. Identitas diri :

1) Nama :

2) Jabatan :

3) Agama :

4) Jenis kelamin :

B. Pertanyaan penelitian

- 1) Bagaimana komunikasi antara pihak dinas pariwisata dengan pengelola pariwisata?
- 2) Apakah ada Tindakan komunikasi seperti sosialisasi mengenai pengembangan pariwisata di kota sibolga antara kepala dinas pariwisata dengan kepala bidang pengembangan terhadap Pantai anggar?
- 3) Bagaimana sumber daya manusia pada pengembangan potensi pariwisata di kota sibolga?
- 4) Apakah sudah ada hal yang dilakukan oleh pihak dinas pariwisata seperti sosialisasi kepada masyarakat dan ikut serta peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata Kota Sibolga?
- 5) Bagaimana sikap pelaksana kebijakan dinas pariwisata terhadap implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di kota sibolga?
- 6) Bagaimana cara pengambilan Keputusan terkait implementasi kebijakan pengembangan potensi pariwisata di kota sibolga? Apakah sudah sesuai dengan struktur birokrasi yang sudah ada?
- 7) Bagaimana cara untuk mengatasi tindak kriminal seperti pencurian yang sekiranya dapat mengganggu keamanan dalam objek pariwisata?

Pengunjung/ wisatawan

A. Pertanyaan panduan

a) Identitas diri

- 1). Nama :
- 2). Agama :
- 3). Jenis kelamin :
- 4). Pekerjaan :

b) Pertanyaan Peneliti

- 1) Bagaimana komunikasi antara pihak dinas pariwisata dengan pengelola pariwisata?
- 2) Apakah ada Tindakan komunikasi seperti sosialisasi mengenai pengembangan pariwisata di kota sibolga antara kepala dinas pariwisata dengan kepala bidang pengembangan terhadap Pantai anggar?
- 3) Bagaimana sumber daya manusia pada pengembangan potensi pariwisata di kota sibolga?
- 4) Apakah sudah ada hal yang dilakukan oleh pihak dinas pariwisata seperti sosialisasi kepada masyarakat dan ikut serta peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata Kota Sibolga?
- 5) Bagaimana sikap pelaksana kebijakan dinas pariwisata terhadap implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di kota sibolga?
- 6) Bagaimana cara pengambilan Keputusan terkait implementasi kebijakan pengembangan potensi pariwisata di kota sibolga? Apakah sudah sesuai dengan struktur birokrasi yang sudah ada?
- 7) Bagaimana cara untuk mengatasi tindak kriminal seperti pencurian yang sekiranya dapat mengganggu keamanan dalam objek pariwisata?

LAMPIRAN 3 HASIL OBSERVASI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA DI KOTA SIBOLGA

Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan adalah mengamati keadaan pariwisata dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kota Sibolga.

A. Tujuan

Untuk memperoleh informasi dan data mengenai kondisi fisik maupun nonfisik pariwisata.

B. Aspek yang diamati :

No	Yang diamati	Ya	Tidak	Keterangan
1	Brosur / Flyer instansi	✓		Ada
2	Struktur Organisasi	✓		Ada
3	Sikap pegawai	✓		Ada
4	Website instansi	✓		Ada
5	Sosial Media Instansi	✓		Ada
6	Sarana Prasarana	✓		Ada

LAMPIRAN 4 HASIL WAWANCARA

INFORMAN KUNCI

A. Identitas Responden

1. N a m a : Ahmad Fajrin Telambanua S.Pi. M.M
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki
3. Umur : 47
4. Pekerjaan : Kepala Dinas Pariwisata Kota Sibolga

B. Pertanyaan – pertanyaan

1). Bagaimana komunikasi antara pihak dinas pariwisata dengan pengelola pariwisata?

Jawaban: “Mengenai komunikasi antara pihak dinas pariwisata dengan pengelola pariwisata hingga saat ini belum ada komunikasi yang jelas akan pengembangan pariwisata di Kota Sibolga dengan melibatkan Pantai anggar di dalamnya sebagai objek wisata pendukung dalam kemajuan wisata di Sibolga.

2).Apakah ada tindakan komunikasi seperti sosialisasi mengenai pengembangan pariwisata di kota sibolga antara kepala dinas pariwisata dengan kepala bidang pengembangan terhadap Pantai anggar ?

Jawaban: mengenai sosialisasi pengembangan pariwisata pantai kota Sibolga pihak dinas pariwisata tentang pengembangan objek wisata pantai anggar/Pelabuhan lama masih dalam tahap membangun perencanaan pantai anggar, dan akan mengembangkan infrastruktur dulu karena harus menyediakan sarana dan prasarana dan infrastruktur baik infrastruktur yang berdampak pada perekonomian seperti membangun foodcourt, pemabangunan dermaga, baik itu pembangunan sarana untuk para wisatawan, dan pembangunan wisata-wisata kuliner yang ada. Cara yang efisien dalam mengenalkan objek wisata Pantai Anggar menurut kami adalah mensosialisasikan bahwa memang Kota Sibolga

3).Bagaimana sumber daya manusia pada pengembangan potensi pariwisata di kota sibolga?

Jawaban: Kemudian permasalahan SDM benar memang, karena ini tekhnologi dengan kemampuan SDM yang ada khususnya penyelenggaran di dinas pariwisata Kota Sibolga jadi memang kami masih merasakan belum

memadai dan berharap kepada pusat memberikan bimbingan kepada kita di daerah, dan kami merasa belum maksimal dalam penyelenggaraan pengembangan pariwisata

4).Apakah Sudah ada hal yang dilakukan oleh pihak dinas pariwisata seperti sosialisasi kepada masyarakat dan ikut serta peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata Kota Sibolga?

Jawaban : Saya belum melihat akan birokrasi yang bekerja sama dengan Pantai anggar ini, tetapi bagi saya SOP pada pengelolaan pariwisata ini sudah ada walaupun dilakukan hanya untuk orang-orang petugas dari pariwisata Pantai anggar Kota Sibolga ini.

5).Bagaimana sikap pelaksana kebijakan dinas pariwisata terhadap implementasi kebijakan pengembangan potensi pariwisata di kota sibolga?

Jawaban : Dalam melaksanakan kebijakan ini semua pihak terlibat. Mulai dari kepala dinas sampai petugas-petugas di lapangan juga. Bentuk dukungan dari dinas jelas ada. Yaitu tadi memfasilitasi kegiatan rapat mingguan yang kita lakukan bersama petugas pariwisata.

6).Bagaimana cara pengambilan keputusan terkait implementasi kebijakan pengembangan potensi pariwisata di kota sibolga? apakah sudah sesuai dengan struktur birokrasi yang ada?

Jawaban : Struktur birokrasi di Dinas Pariwisata Kota Sibolga sudah ada dan tampaknya telah dipajang di depan kantor. Struktur birokrasi tersebut sudah tersusun sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi masing-masing sesuai bidangnya. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa bagian yang kosong atau belum terisi dalam struktur birokrasi tersebut karena kekurangan sumber daya manusia.

LAMPIRAN HASIL WAWANCARA

INFORMAN UTAMA

A. Identitas Responden

1. Nama : Hendra Libestro S.Kom
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Umur : 38 Tahun
4. Pekerjaan : Kepala Bidang Pengembangan

B. Pertanyaan – pertanyaan

1)apakah ada tindakan komunikasi seperti sosialisasi mengenai pengembangan pariwisata di kota sibolga antara kepala dinas pariwisata dengan pengelola wisata?

Jawaban: Mengenai komunikasi antara pihak dinas pariwisata tentang pengembangan objek wisata pantai anggar/Pelabuhan lama masih dalam tahap membangun perencanaan pantai anggar, dan akan mengembangkan infrastruktur dulu karena harus menyediakan sarana dan prasarana dan infrastruktur baik infrastruktur yang berdampak pada perekonomian seperti membangun foodcourt, pemabangunan dermaga, baik itu pembangunan sarana untuk para wisatawan, dan pembangunan wisata-wisata kuliner yang ada. Cara yang efisien dalam mengenalkan objek wisata Pantai Anggar menurut kami adalah mensosialisasikan bahwa memang Kota Sibolga memiliki potensi wisata seperti Pantai Anggar ini serta menggunakan peran media yang ada, terutama menggunakan peran media sosial secara continue baik itu media massa maupun media cetak.

2).Bagaimana sumber daya manusia pada pengembangan potensi pariwisata di kota sibolga?

Jawaban: keadaan prasarana objek wisata Pantai anggar menurut saya sangat memprihatinkan intinya tidak ada perhatian dari pemerintah khususnya Dinas pariwisata untuk melakukan resofasi dan perbaikan fasilitas yang sudah ada. Menurut saya apabila objek wisata tersebut tidak dikembangkan sangat rugi sekali karena Lokasi Pantai anggar tidak jauh dari Pelabuhan yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menarik perhatian wisatawan untuk berkunjung ke objek wisata Pantai anggar tersebut

3).Bagaimana sikap pelaksana kebijakan dinas pariwisata terhadap implementasi kebijakan pengembangan potensi pariwisata di kota sibolga?

Jawaban: Ya, untuk tata karma petugas pengembangan Pariwisata kami cukup ramah dalam melayani.

4).Bagaimana cara pengambilan keputusan terkait implementasi kebijakan pengembangan potensi pariwisata di kota sibolga? apakah sudah sesuai dengan struktur birokrasi yang ada?

Jawaban: Untuk pengambilan keputusan, sudah sesuai dengan struktur birokrasi yang tertulis, dan cara memutuskan kebijakan oleh petugas dinas pariwisata sudah termasuk masukan dari masyarakat.

LAMPIRAN HASIL WAWANCARA

INFORMAN PENDUKUNG

Pengelola wisata pelabuhan lama

A. Identitas Responden

1. N a m a : Perusahaan Daerah Sibolga Nauli (PD SINA)

B. Pertanyaan peneliti :

1).apakah ada tindakan komunikasi seperti sosialisasi mengenai pengembangan pariwisata di kota sibolga antara pengelola pariwisata dengan masyarakat?

Jawaban : Terkait dengan sosialisasi pengembangan Pariwisata sampai saat ini belum kami terima sosialisasi tersebut , pihak dinas pariwisata juga membuat pengembangan parriwisata kota Sibolga menurut peraturan daerah kota Sibolga

2).sumber daya manusia pada pengembangan potensi pariwisata di kota sibolga?

Jawaban ; Untuk sumber daya pengembangan Pariwisata sebenarnya ada hal ini dapat dilihat dengan pariwisata yang dimiliki kota Sibolga seperti pantai dan petugas mengelola seperti masyarakat kota sibolga yang membutuhkan lapangan kerja juga masih tersedia, hanya saja perlu didukung oleh pemerintah kota Sibolga dan Dinas Pariwisata kota Sibolga.

3).Bagaimana sikap pelaksana kebijakan dinas pariwisata terhadap implementasi kebijakan pengembangan potensi pariwisata di kota sibolga?

Jawaban : untuk Sikap atau tata karma petugas kota sibolga sudah cukup baik,Hal ini dapat dilihat dari pelayanan dan SOP pemerinta kota Sibolga.

4).Bagaimana cara pengambilan keputusan terkait implementasi kebijakan pengembangan potensi pariwisata di kota sibolga? apakah sudah sesuai dengan struktur birokrasi yang ada?

Jawaban: Untuk keputusan implementasi pengembangan Pariwisata kota Sibolga Sesuai dengan SOP pemerintah Kota Sibolga, hanya saja dengan aturan yang sudah dipaparkan tidak dilaksanakan oleh masyarat kota Sibolga .

LAMPIRAN HASIL WAWANCARA

Pengunjung/wisatawan :

A. Identitas Responden

1. N a m a : Dinda Azwar
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Umur : 32 Tahun
4. Pekerjaan : Honor

B. Pertanyaan peneliti :

1).apakah ada tindakan komunikasi seperti sosialisasi mengenai pengembangan pariwisata di kota sibolga antara pengelola pariwisata dengan masyarakat?

Jawaban : dengan adanya komunikasi yang jelas terhadap pengelola wisata mungkin dapat membantu percepatan pengembangan wisata di kota sibolga dengan menjadikan Pelabuhan lama ini menjadi wisata favorit di kota sibolga.

2). Bagaimana sumber daya manusia pada pengembangan potensi pariwisata di kota sibolga?

Jawaban : saya melihat petugas-petugas ataupun staf-f-staff di pariwisata ini sudah baik adanya petugas di pintu jaga, di pintu karcis dan sudah cukup baik akan kelengkapan di setiap sumber daya manusianya disini.

3). Bagaimana sikap pelaksana kebijakan dinas pariwisata terhadap implementasi kebijakan pengembangan potensi pariwisata di kota sibolga?

Jawaban : jika adanya kebijakan baru lagi yang saya harapkan agar tetap memegang komitmen pada kebijakan yang telah di tetapkan baik dari pemerintah maupun pihak pariwisata demi kemajuan dan pengembangan yang semangkin baik Pelabuhan lama tersebut dan meningkatkan pengembngan pariwisata di kota sibolga.

4). Bagaimana cara pengambilan keputusan terkait implementasi kebijakan pengembangan potensi pariwisata di kota sibolga? apakah sudah sesuai dengan struktur birokrasi yang ada?

Jawaban : saya belum melihat akan birokrasi yang bekerja sama dengan pariwisata ini tetapi bagi saya SOP pada pengelolaan ini sudah ada walaupun dilakukan hanya orang-orang petugas dari wisata Pelabuhan lama di kota sibolga.

LAMPIRAN HASIL WAWANCARA

Pengunjung/Wisatawan

A. Identitas Responden

1. N a m a : Cindy Kristy
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Umur : 23 Tahun
4. Pekerjaan : Mahasiswa

B. Pertanyaan peneliti :

1).apakah ada tindakan komunikasi seperti sosialisasi mengenai pengembangan pariwisata di kota sibolga antara pengelola pariwisata dengan masyarakat?

Jawaban : dengan adanya komunikasi yang jelas terhadap pengelola wisata mungkin dapat membantu percepatan pengembangan wisata di kota sibolga dengan menjadikan Pelabuhan lama ini menjadi wisata favorit di kota sibolga.

2). Bagaimana sumber daya manusia pada pengembangan potensi pariwisata di kota sibolga?

Jawaban : saya melihat petugas-petugas ataupun staf-f-staff di pariwisata ini sudah baik adanya petugas di pintu jaga, di pintu karcis dan sudah cukup baik akan kelengkapan di setiap sumber daya manusianya disini.

3). Bagaimana sikap pelaksana kebijakan dinas pariwisata terhadap implementasi kebijakan pengembangan potensi pariwisata di kota sibolga?

Jawaban : jika adanya kebijakan baru lagi yang saya harapkan agar tetap memegang komitmen pada kebijakan yang telah di tetapkan baik dari pemerintah maupun pihak pariwisata demi kemajuan dan pengembangan yang semangkin baik Pelabuhan lama tersebut dan meningkatkan pengembangan pariwisata di kota sibolga.

4). Bagaimana cara pengambilan keputusan terkait implementasi kebijakan pengembangan potensi pariwisata di kota sibolga? apakah sudah sesuai dengan struktur birokrasi yang ada?

Jawaban : saya belum melihat akan birokrasi yang bekerja sama dengan pariwisata ini tetapi bagi saya SOP pada pengelolaan ini sudah ada walaupun dilakukan hanya orang-orang petugas dari wisata Pelabuhan lama di kota sibolga.

LAMPIRAN 5. SURAT PENGANTAR RISET DARI KAMPUS



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Seliabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 1597/FIS.0/01.10/VI/2024
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Pengambilan Data/Riset

Medan, 21 Juni 2024

Kepada Yth,
Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sibolga
Jl. Dr. Ferdinand Lumban Tobing No. 44, Sibolga Kota, Kota Beringin, Sibolga
Di Tempat

Dengan hormat,
Kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya menerima mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Riska Theresia Sihombing
N P M : 208510018
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Saat ini sedang membutuhkan beberapa data pada Kantor Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sibolga untuk menyelesaikan penelitian/riset yang berjudul :

"Implementasi Kebijakan Pengembangan Potensi Pariwisata di Kota Sibolga"

Perlu kami jelaskan bahwa penelitian dan pengambilan data yang diperlukan ini semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian dalam penyusunan skripsi. Sehubungan dengan ini, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan data yang diminta pada bidang yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Walid Musthafa S., S.Sos, M.IP

- Tembusan:
1. Ka. Prodi Ilmu Pemerintahan
 2. Mahasiswa ybs
 3. Arsip

LAMPIRAN 6 SURAT SELESAI RISET DARI KANTOR DINAS



PEMERINTAH KOTA SIBOLGA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jln. Dr. Ferdinand Lumban Tobing No. 44 Telp/Fax. 0631-23132

Website : www.pariwisatasibolga.com

SIBOLGA

Kode Pos 22521

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 556 / 1021 / 2024

Sehubungan dengan surat dari Universitas Medan Area Nomor : 1597/FIS.0/01.10/V/2024 tanggal 21 Juni 2024 perihal Permohonan Izin Pengambilan Data/Riset.

Setelah kami teliti, Pihak kami tidak merasa keberatan atas Penelitian yang dilaksanakan oleh:

1. Nama : **Riska Theresia Sihombing**
2. N P M : 208510018
3. Tempat Penelitian : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sibolga
4. Judul Penelitian : **"Implementasi Kebijakan Pengembangan Potensi Pariwisata di Kota Sibolga"**
5. Waktu Penelitian : 24 Juni s/d 24 Juli 2024

Akan melaksanakan Penelitian dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Selama melakukan Penelitian yang bersangkutan harus mematuhi, mentaati Peraturan dan Perundang - undangan serta Ketentuan yang berlaku di Kota Sibolga;
2. Menjaga keamanan dan ketertiban umum selama melaksanakan Penelitian;
3. Setelah melaksanakan Penelitian tersebut, supaya yang bersangkutan melapor ke Walikota Sibolga Cq.Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga;
4. Apabila Masa Berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai sampai dengan tanggal yang ditentukan, perpanjangan harus diajukan pada instansi terkait;
5. Surat Rekomendasi ini akan di cabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Rekomendasi tidak mentaati/mengidahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas;

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan seperlunya.

Sibolga, 09 Juli 2024

KEMENTERIAN DINAS PARIWISATA PEMUDA
DAN OLAAHRAGA KOTA SIBOLGA,



ANMAD FAZRI TELAUMBANUA, S.P.I., M.M

NIP. 19840805 200502 1 00 1

LAMPIRAN 7. DOKUMENTASI PENELITIAN

Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Kota Sibolga

Bapak Hendro Libestro S.Kom



Kepala Dinas Pariwisata Kota Sibolga

Ahmad fajrin Telambanua S.Pi M.M



Ibu Cindy Kristi (Pengunjung)



Ibu Dinda Azwar (Pengunjung)



Salah satu staff PD.Sina

Bapak Hendry Sinaga



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

PANTAI PELABUHAN LAMA KOTA SIBOLGA

PANTAI ANGGAR KOTA SIBOLGA



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area